



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I GUSTI PUTU PARWATA**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **967870**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 14.220.700.000**

1. Tanah Seluas 2.020 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 3.030.000.000
2. Tanah Seluas 3.460 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 3.460.000.000
3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 705 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 1.057.500.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 295 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 442.500.000
8. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 457.500.000
9. Tanah Seluas 1.790 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 1.253.000.000
10. Tanah Seluas 378 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 1.285.200.000
11. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL



SENDIRI Rp. 1.710.000.000

12. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL

SENDIRI Rp. 450.000.000

13. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL

SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 200.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 91.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 547.979.363

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 15.059.779.363

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 15.059.779.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.